

KEDAULATAN PANGAN DAN KEADILAN SOSIAL

Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota
dalam Akses Pangan Bergizi



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial:
Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi*

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

8 December 2025

KEDAULATAN PANGAN DAN KEADILAN SOSIAL: Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi

I. Pendahuluan: Pangan, Keadilan, dan Luka Tersembunyi di Antara Desa dan Kota

Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi; ia adalah fondasi kehidupan, syarat utama keberlangsungan generasi, bahkan penentu kualitas peradaban. Di Indonesia, isu pangan sering muncul dalam konteks “ketahanan pangan” dan “swasembada”, tetapi perdebatan yang lebih dalam sesungguhnya menyentuh dimensi **kedaulatan pangan** dan **keadilan sosial**.

Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara atas pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Undang-Undang Pangan menempatkan konsep **kedaulatan dan kemandirian pangan** sebagai semangat dasar sistem pangan nasional: negara dan bangsa berhak menentukan kebijakan pangannya secara mandiri untuk menjamin hak atas pangan bagi seluruh rakyat.([BPHN](#))

Namun, di balik kerangka hukum dan narasi kebijakan, terdapat realitas yang kurang simetris: **kesenjangan desa–kota** dalam akses terhadap pangan yang bergizi. Di banyak desa, pangan pokok (beras, jagung, ubi) relatif tersedia, tetapi akses terhadap sumber protein hewani, sayur dan buah beragam, serta pangan kaya mikronutrien sering terbatas. Sebaliknya, di kota, ketersediaan pangan beragam sangat tinggi, tetapi pola konsumsi sering membelok ke arah makanan ultra-proses yang tinggi gula, lemak, dan garam—menghadirkan

beban gizi ganda: kekurangan dan kelebihan gizi sekaligus. ([ScienceDirect](#))

Indonesia sendiri masih berhadapan dengan masalah serius berupa **stunting** (gangguan pertumbuhan kronis pada anak) dan bentuk-bentuk malnutrisi lain. Data survei gizi nasional menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting, tetapi angkanya masih di atas batas toleransi WHO, dan disparitas antarwilayah—termasuk perbedaan desa–kota—masih signifikan. ([Ministry of Health of Indonesia](#))

Dalam konteks inilah, pembicaraan tentang “**kedaulatan pangan**” tidak cukup berhenti pada swasembada produksi, dan “**keadilan sosial**” tidak cukup diukur oleh angka pertumbuhan ekonomi.

Keduanya harus **dipertemukan** dalam agenda konkret: bagaimana memastikan **anak desa dan anak kota sama-sama memiliki akses nyata terhadap pangan yang sehat dan bergizi**, bukan sekadar cukup kalori?

Tema “Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial: Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi” mengajak kita melihat sistem pangan dari hulu hingga hilir—dari petani, nelayan, dan pekebun di desa hingga konsumen di permukiman padat kota—seraya menimbanginya dalam timbangan hak asasi, keadilan distributif, dan tanggung jawab negara.

II. Kerangka Konseptual: Kedaulatan Pangan, Keadilan Sosial, dan Kesenjangan Desa–Kota

1. Kedaulatan Pangan: Dari Via Campesina ke Konteks Indonesia

Secara historis, konsep **kedaulatan pangan (food sovereignty)** muncul sebagai kritik terhadap paradigma ketahanan pangan (food security) yang dianggap terlalu berorientasi pada pasar global dan impor, serta kurang memerhatikan nasib produsen kecil dan kearifan lokal. La Via Campesina—gerakan petani internasional—merumuskan kedaulatan pangan sebagai **hak rakyat, komunitas, dan negara untuk menentukan sistem pangan dan pertaniannya sendiri**, memprioritaskan produksi lokal, melindungi petani kecil, dan

menjamin pangan yang sehat, bergizi, dan sesuai budaya. ([Serikat Petani Indonesia](#))

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan pangan dimaknai sebagai **hak bangsa** untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara mandiri tanpa didominasi kepentingan pasar global; sekaligus **hak rakyat** untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi.

Konsep ini menekankan:

- Perlindungan dan pemberdayaan petani kecil, nelayan, dan pelaku pangan lokal.
- Diversifikasi pangan lokal (sagu, jagung, umbi, ikan, sayur lokal) sebagai sumber gizi yang penting.
- Sistem produksi pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi cukup, tetapi juga **siapa yang memproduksi, dengan cara apa, untuk siapa, dan dengan kualitas gizi seperti apa.**

2. Keadilan Sosial dalam Akses Pangan Bergizi

Keadilan sosial mengandaikan bahwa **setiap orang, tanpa memandang status ekonomi atau lokasi geografis, berhak atas akses yang setara terhadap pangan bergizi.** Dalam perspektif hak asasi, pangan adalah **hak dasar (basic right)**, bukan “bonus” yang diberikan ketika ekonomi tumbuh.

Keadilan pangan (food justice) mencakup:

1. **Keadilan distribusi:** apakah pangan bergizi terdistribusi merata, atau terkonsentrasi di kota-kota besar dan pusat-pusat modern trade.
2. **Keadilan partisipasi:** apakah petani, konsumen miskin, dan komunitas marginal dilibatkan dalam perumusan kebijakan pangan.
3. **Keadilan pengakuan:** apakah budaya pangan lokal, pengetahuan tradisional, dan sistem produksi rakyat diakui dan dihargai.

Ketika di satu sisi, mall di kota besar penuh dengan supermarket, restoran cepat saji, dan café sehat; sementara di sisi lain, anak di desa

sulit mendapatkan telur harian atau buah segar, maka **ketimpangan akses pangan bergizi** itu adalah persoalan keadilan sosial yang sangat nyata.

3. Kesenjangan Desa–Kota: Dimensi dan Manifestasinya

Kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi dapat dilihat dari beberapa dimensi:

1. Dimensi ketersediaan fisik

- Di desa, bahan pangan pokok dan hasil pertanian lokal mungkin relatif tersedia, tetapi jenis pangan kaya protein, vitamin, dan mineral sering terbatas, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Di kota, variasi bahan pangan sangat tinggi, tetapi aksesnya pula bergantung pada daya beli dan pilihan konsumsi.

2. Dimensi akses ekonomi

- Pendapatan rumah tangga pedesaan sering lebih rendah dan fluktuatif, bergantung musim dan harga komoditas.
- Kenaikan harga pangan (inflasi pangan) memukul rumah tangga miskin desa dan kota, tetapi dampaknya bisa lebih berat di desa yang jauh dari pusat distribusi.

3. Dimensi akses informasi dan pengetahuan gizi

- Pengetahuan tentang gizi seimbang, bahaya makanan ultra-proses, dan pentingnya keberagaman pangan sering lebih rendah di kelompok miskin—baik di desa maupun kota.
- Media dan iklan justru sering mendorong konsumsi makanan instan dan minuman manis yang “statusnya naik”, meski gizinya rendah.

4. Dimensi kualitas lingkungan dan layanan dasar

- Sanitasi, air bersih, layanan kesehatan ibu dan anak, serta sistem posyandu berpengaruh besar terhadap status gizi. Kelemahan di aspek ini memperburuk masalah gizi, terutama di wilayah pedesaan dan permukiman kumuh perkotaan. ([Rural and Remote Health](#))

III. Potret Akses Pangan Bergizi Desa–Kota di Indonesia

1. Beban Stunting dan Malnutrisi

Indonesia masih menghadapi tantangan gizi cukup serius. Data survei gizi beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa prevalensi **stunting** balita mengalami tren penurunan dari sekitar 27–28% pada 2019 menjadi sekitar 21–22% pada 2023, dan terus diupayakan turun menuju target 14%. ([Ministry of Health of Indonesia](#))

Namun, angka nasional yang membaik menyembunyikan **ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok sosial**. Laporan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di pedesaan cenderung **lebih tinggi** dibandingkan di perkotaan; dan perbedaan ini terkait erat dengan tingkat kemiskinan, akses layanan kesehatan, kualitas sanitasi, serta pola konsumsi rumah tangga. ([DJPK Kemenkeu](#))

Selain itu, Indonesia juga menghadapi **beban gizi ganda**: di satu rumah tangga, mungkin terdapat anak stunting sekaligus ibu yang overweight/obesitas. Pola ini sering muncul ketika keluarga mengonsumsi pangan murah yang tinggi kalori tetapi miskin protein dan mikronutrien, sementara konsumsi buah, sayur, dan protein hewani rendah. ([ScienceDirect](#))

2. Pola Konsumsi: Desa vs Kota

Berbagai studi menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di Indonesia sedang mengalami transisi:

- Di banyak daerah, konsumsi bergerak dari pangan tradisional berbasis umbi, sereal lokal, dan sayur-mayur ke **makanan ultra-proses** dan minuman manis, terutama di kawasan urban dan peri-urban. ([ScienceDirect](#))
- Di pedesaan, pola konsumsi sering didominasi karbohidrat (beras) dengan asupan protein hewani dan sayur/buah yang tidak stabil, tergantung musim dan harga.

Sebagai contoh naratif:

- Di sebuah desa pegunungan, keluarga petani padi dan sayur mungkin mengonsumsi nasi, sayur rebus, sambal, dan sesekali ikan

asin. Telur atau daging ayam bukan menu harian, melainkan “makanan mewah” untuk hari besar.

- Di pinggiran kota, keluarga pekerja informal mudah menemukan jajanan gorengan, mi instan, minuman berenergi, dan fast food murah. Anak sekolah lebih mengenal minuman manis dalam kemasan dibandingkan buah lokal.

Keduanya sama-sama menghadapi risiko gizi: desa cenderung kekurangan gizi kronis (stunting, anemia), sementara kota menghadapi obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular; tetapi **akar masalahnya sama: ketidakadilan akses terhadap pangan bergizi yang berkualitas dan terjangkau.**

3. Determinan Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa ketimpangan gizi dan akses pangan berkaitan erat dengan faktor:

- **Pendapatan dan status sosial-ekonomi** (SES)
- **Lokasi geografis** (desa–kota, pusat–pinggiran)
- **Kualitas lingkungan** (air bersih, sanitasi, perumahan)
- **Akses layanan kesehatan dan pendidikan**

Untuk keluarga miskin, baik di desa maupun kota, keputusan konsumsi pangan adalah **kompromi antara harga, keterjangkauan, dan kenyang**—bukan antara sehat dan tidak sehat. Ketika harga telur, daging, dan buah segar terasa mahal, pilihan yang muncul adalah makanan murah tinggi karbohidrat dan lemak.

IV. Akar Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi

1. Struktur Ekonomi dan Kemiskinan

Di banyak wilayah pedesaan, rumah tangga petani justru menjadi **kelompok yang paling rentan terhadap kerawanan pangan.**

Pendapatan mereka sangat dipengaruhi harga komoditas, biaya input (pupuk, benih, pakan), dan struktur pasar yang sering oligopsoni (pembeli sedikit, petani banyak). Ketika harga jatuh di tingkat produsen, daya beli petani untuk membeli pangan bergizi juga melemah.

Di perkotaan, keluarga buruh harian, pekerja sektor informal, dan penghuni permukiman kumuh adalah kelompok yang rentan. Pendapatan yang tidak pasti membuat mereka lebih memilih pangan yang “mengenyangkan” tapi belum tentu bergizi.

Secara struktural, **ketidaksetaraan distribusi pendapatan** berkontribusi langsung pada **ketimpangan gizi**. Hal ini menjadikan isu pangan bukan semata teknis pertanian, tetapi persoalan **struktur ekonomi dan keadilan distribusi**.

2. Keterbatasan Infrastruktur, Logistik, dan Sistem Distribusi

Akses pangan bergizi di desa sangat bergantung pada **infrastruktur jalan, transportasi, pasar, dan fasilitas penyimpanan (cold chain)**.

Di wilayah dengan infrastruktur terbatas, distribusi pangan bergizi (misalnya ikan segar, susu, sayur dan buah) menjadi mahal dan sulit diakses, sehingga masyarakat mengganti dengan pangan awet berpengawet dan bergula tinggi. ([E-Publikasi Pertanian](#))

Sebaliknya, di kota besar, pasar modern, minimarket, dan jaringan logistik dingin (cold chain) cenderung berkembang, tetapi terkonsentrasi di kawasan ekonomi yang lebih makmur. Permukiman pinggiran dan komunitas miskin sering tetap sulit mengakses pangan segar berkualitas.

3. Dominasi Rantai Nilai Panjang dan Pasar Modern

Dalam sistem pangan modern, rantai nilai dari petani hingga konsumen kerap sangat panjang:

pelaku input → petani → tengkulak/pedagang pengumpul → grosir → pengecer besar → retail modern → konsumen.

Akibatnya:

- Harga di tingkat petani rendah, sementara harga di konsumen tinggi.
- Margin besar banyak dinikmati di mata rantai tengah, bukan oleh produsen atau konsumen miskin.
- Pangan sehat (organik, segar, berkualitas premium) sering diposisikan sebagai **produk “kelas menengah–atas”**, sehingga secara struktural menjauh dari kelompok miskin desa dan kota.

4. Pengetahuan Gizi, Budaya Konsumsi, dan Komodifikasi Pangan

Kesenjangan akses pangan bergizi tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga **pengetahuan dan budaya konsumsi**.

- Kampanye iklan makanan ultra-proses, minuman manis, dan snack tinggi garam sering jauh lebih agresif dan menarik dibandingkan edukasi gizi seimbang.
- Pangan lokal yang sebenarnya kaya gizi (daun kelor, ikan kecil, kacang-kacangan, umbi-umbian lokal) sering dianggap “makanan orang miskin” dan kemudian ditinggalkan.

Di kota, makanan cepat saji dipersepsikan sebagai simbol gaya hidup modern; di desa, mi instan menjadi “ikon praktis dan bergengsi”.

Tanpa intervensi pendidikan gizi yang kuat, **komodifikasi pangan oleh industri global** dapat memperlebar kesenjangan akses gizi yang sehat dan berkelanjutan.

5. Tata Kelola dan Orientasi Kebijakan

Dalam beberapa dekade, kebijakan pangan sering fokus pada **ketersediaan fisik pangan pokok** (terutama beras), stabilisasi harga, dan swasembada. Dimensi **gizi, keberagaman pangan, dan keadilan akses** tidak selalu menjadi pusat perhatian. ([E-Publikasi Pertanian](#))

Selain itu:

- Program intervensi sering bersifat sektoral (kesehatan, pertanian, sosial) dan kurang terintegrasi.
- Koordinasi kebijakan antara pusat–daerah, serta antara desa–kota, tidak selalu optimal.
- Program gizi kadang dilihat sebagai “urusan kesehatan”, sementara aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang berada di ranah ekonomi, sosial, dan pendidikan kurang terpadu.

V. Kedaulatan Pangan sebagai Jalan Menuju Keadilan Sosial

Untuk mengurangi kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi, pendekatan **kedaulatan pangan** dapat menjadi kerangka strategis, dengan beberapa pilar penting:

1. Reorientasi dari Sekadar Ketahanan ke Kedaulatan Pangan

Ketahanan pangan (food security) menekankan “pangan cukup tersedia dan dapat diakses”, tetapi tidak selalu mempertanyakan **siapa yang memproduksi dan bagaimana**. Kedaulatan pangan menambahkan dimensi:

- **Hak penuh bangsa dan rakyat** untuk menentukan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada produsen kecil. ([Berkas DPR](#))
- Penolakan terhadap dominasi korporasi besar dan spekulasi pasar yang mengorbankan kepentingan petani dan konsumen miskin.
- Pengakuan bahwa **pangan adalah hak, bukan sekadar komoditas**.

Dengan reorientasi ini, keberhasilan sistem pangan tidak hanya diukur dari produksi ton beras, tetapi dari **penurunan stunting, akses merata terhadap pangan kaya gizi, dan peningkatan kesejahteraan petani–nelayan**.

2. Pemberdayaan Petani Kecil dan Produsen Lokal

Kedaulatan pangan menempatkan petani kecil, nelayan tradisional, peternak rakyat, dan pelaku UMKM pangan sebagai aktor utama, bukan “korban keadaan”. Strategi yang relevan:

- Reforma agraria dan penguatan hak atas tanah, agar petani memiliki jaminan penguasaan lahan.
- Akses terhadap kredit lunak, teknologi, dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi komoditas.
- Penguatan **kelompok tani, koperasi, dan BUMDes pangan** sebagai pengelola rantai nilai yang lebih adil.

Ketika petani desa berdaya, mereka tidak hanya memproduksi untuk pasar kota, tetapi juga **mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan komunitasnya sendiri**.

3. Diversifikasi Pangan Lokal Bergizi

Kedaulatan pangan mendorong **diversifikasi**:

- Memanfaatkan sumber karbohidrat non-beras (jagung, sagu, singkong, talas).

- Memperkuat konsumsi protein hewani lokal (ikan sungai, ikan laut, telur, ayam kampung).
- Menghidupkan kembali konsumsi sayur-mayur lokal, kacang-kacangan, dan buah tropis.

Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas (beras) sekaligus memperkaya pola konsumsi bergizi, baik di desa maupun kota.

4. Sistem Pangan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Produksi pangan harus mempertimbangkan:

- Kelestarian tanah dan air.
- Pengurangan pestisida berbahaya.
- Adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kedaulatan pangan dalam arti ini berupaya memastikan bahwa **pangan bergizi untuk generasi sekarang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang** untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

VI. Strategi Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi

Mengurangi kesenjangan desa–kota membutuhkan **pendekatan multi-level dan multi-aktor**: dari kebijakan nasional hingga prakarsa komunitas.

1. Reformasi Kebijakan Nasional dan Daerah

Beberapa arah strategis:

1. **Integrasi kedaulatan pangan dan keadilan sosial** ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk visi 2045.
2. Penguatan implementasi kebijakan pangan dan gizi yang menekankan:
 - Ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi.
 - Perlindungan produsen kecil.

- Perluasan jaring pengaman sosial berbasis pangan bergizi (bukan sekadar pangan murah berkalori tinggi).([Badan Pangan Nasional](#))
- 3. Desentralisasi yang efektif: pemerintah daerah diberi ruang dan kapasitas untuk mengembangkan **strategi pangan lokal**, menghubungkan potensi desa dan kebutuhan kota.

2. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Distribusi Pangan

Untuk menjembatani desa dan kota, beberapa langkah penting:

- Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan transportasi yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan pasar.
- Pengembangan **rantai dingin (cold chain)** untuk produk ikan, daging, dan susu agar dapat didistribusikan ke wilayah terpencil dengan kualitas terjaga.
- Fasilitasi **pasar tani, pasar desa, dan pasar tradisional** yang menjual pangan segar dengan harga terjangkau.
- Pengembangan **lumbung pangan komunitas** dan **bank pangan (food bank)** yang mengelola surplus pangan kota untuk kebutuhan kelompok rentan, sepanjang dikelola dengan standar keamanan pangan yang baik.

3. Intervensi Berbasis Komunitas: Posyandu Gizi, Kebun Gizi, Urban Farming

Perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang konsisten di tingkat komunitas. Beberapa contoh:

1. **Posyandu Gizi Plus**
 - Posyandu tidak hanya menimbang balita, tetapi juga menjadi pusat edukasi gizi, demo masak menu lokal bergizi, dan pendataan keluarga berisiko stunting.
2. **Kebun Gizi Desa dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**
 - Rumah tangga dan komunitas menanam sayur, tanaman obat keluarga, dan buah di pekarangan.
 - Sekolah membangun **kebun sekolah** sebagai laboratorium hidup untuk belajar gizi, biologi, dan kearifan lokal.
3. **Urban Farming di Kota**

- Pemanfaatan lahan sempit, rooftop, dan ruang publik untuk menanam sayuran dan buah.
- Kegiatan ini dapat mengurangi biaya pangan sehat dan mengajarkan kemandirian pangan kepada warga kota.

Program-program seperti ini menghubungkan **edukasi, aksi, dan solidaritas**—menjadikan pangan bergizi sebagai proyek bersama, bukan urusan individu.

4. Inovasi Teknologi Digital dan Keuangan

Teknologi digital dapat menjadi “jembatan baru” antara desa dan kota:

- Platform **e-commerce pangan lokal** yang menghubungkan petani desa dengan konsumen kota dengan rantai nilai yang lebih pendek.
- Aplikasi informasi harga dan cuaca yang membantu petani mengatur pola tanam dan menjual hasil dengan harga lebih adil.
- Fintech dan layanan keuangan inklusif yang memberi akses permodalan bagi petani dan UMKM pangan.

Teknologi juga dapat digunakan untuk:

- Aplikasi edukasi gizi untuk ibu hamil, ibu balita, dan remaja.
- Sistem pemantauan stunting dan status gizi berbasis data real time di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, pemanfaatan teknologi mensyaratkan **literasi digital dan infrastruktur telekomunikasi** yang memadai di desa-desa.

5. Program Makan Bergizi dan Intervensi Terarah

Pemerintah Indonesia telah mulai mengembangkan berbagai program terintegrasi untuk mengurangi stunting dan malnutrisi, termasuk program makan bergizi di sekolah dan intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri. Salah satu inisiatif terbaru adalah program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** bagi anak sekolah dan kelompok rentan, yang dirancang untuk memperbaiki status gizi sekaligus menghubungkan permintaan pangan dengan produksi petani lokal. ([Media Keuangan](#))

Jika dirancang dengan perspektif kedaulatan pangan dan keadilan sosial, program semacam ini dapat:

- Mengurangi kesenjangan asupan gizi antara anak desa dan anak kota.
- Menjadi pasar yang relatif stabil bagi petani kecil dan UMKM pangan lokal.
- Menjadi sarana edukasi gizi dan pembentukan kebiasaan makan sehat sejak dini.

Kuncinya adalah **desain kebijakan yang inklusif dan tata kelola yang baik**, agar program tidak jatuh menjadi sekadar pengadaan massal tanpa kualitas gizi dan tanpa dampak pada kesejahteraan produsen kecil.

6. Kolaborasi Multi-Aktor: Pemerintah, Swasta, Masyarakat Sipil, dan Komunitas Iman

Mengurangi kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu aktor. Diperlukan:

- Pemerintah sebagai pengarah kebijakan, penyedia anggaran, dan penjamin regulasi yang adil.
- Swasta sebagai inovator dalam produksi, distribusi, dan produk pangan sehat yang terjangkau.
- LSM dan organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas, pendamping komunitas, dan penggerak advokasi.
- Komunitas agama dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan budaya konsumsi dan etika keadilan sosial.

Dengan kolaborasi tersebut, pangan bergizi dapat dipahami bukan hanya isu teknis, tetapi juga **panggilan moral** untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

VII. Ilustrasi Kasus: Menghubungkan Desa dan Kota Lewat Pangan Bergizi

Untuk memerjelas gagasan di atas, bayangkan beberapa sketsa kasus:

1. Kabupaten X: Desa Penghasil Sayur, Tinggi Stunting

- Desa di dataran tinggi adalah lumbung sayur untuk kota terdekat. Namun, banyak balita di desa tersebut mengalami stunting.

- Petani menjual sayur terbaik ke pasar kota karena harganya lebih tinggi; keluarga petani sendiri sering hanya mengonsumsi sisa.
- Program intervensi kemudian menghubungkan **posyandu gizi, kebun gizi desa, dan kontrak pasokan sayur untuk program makan bergizi di sekolah desa**, sehingga anak-anak desa menjadi prioritas penerima sayur berkualitas.

2. Kota Y: Urban Farming dan Bank Pangan

- Di kawasan padat penduduk, kelompok warga mengembangkan kebun vertikal, hidroponik, dan petak-petak sayur di lahan tidur.
- Kerja sama dengan pasar tradisional menghasilkan program **bank pangan**, di mana sayur dan buah yang masih layak tapi tidak terjual disalurkan ke dapur komunitas.
- Anak-anak di lingkungan tersebut mulai mengenal sayur segar, bukan hanya jajanan ultra-proses.

3. Program Sekolah: Menghubungkan Petani Desa dan Murid Kota

- Pemerintah daerah menjalin kemitraan antara koperasi petani desa dan sekolah kota.
- Menu makan bergizi di sekolah menggunakan beras lokal, sayur dan buah dari desa, serta telur dari peternak rakyat.
- Harga ditetapkan dengan skema win-win: petani memperoleh kepastian pasar, sekolah memperoleh pangan bergizi dengan harga wajar.

Sketsa-sketsa ini menunjukkan bagaimana **kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan pengurangan kesenjangan desa–kota** dapat diwujudkan dalam program konkret yang menghubungkan **hulu dan hilir** sistem pangan.

VIII. Agenda Reformasi: Peta Jalan Menuju Kedaulatan Pangan yang Berkeadilan

Untuk menjadikan kedaulatan pangan sebagai instrumen keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi, beberapa agenda reformasi strategis dapat dirumuskan:

1. Menempatkan Hak atas Pangan Bergizi sebagai “Core Goal” Pembangunan

- Mengintegrasikan indikator gizi (stunting, wasting, anemia, obesitas) dan akses pangan bergizi ke dalam **indikator kinerja utama** pembangunan nasional dan daerah.
- Menjadikan penurunan kesenjangan desa–kota dalam akses gizi sebagai salah satu **target eksplisit** dalam dokumen perencanaan, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi.

2. Membangun Sistem Pangan Terintegrasi Desa–Kota

- Mengembangkan **koridor pangan** yang menghubungkan sentra produksi di desa dengan klaster konsumsi di kota melalui sistem logistik yang efisien dan adil.
- Mendorong pembentukan **pasar pangan lokal** yang mempertemukan langsung produsen dan konsumen (farmers’ market, komunitas langganan sayur, dan lain-lain).

3. Mereformulasi Subsidi dan Insentif

- Mengarahkan insentif pemerintah bukan hanya untuk produksi pangan pokok, tetapi juga **produksi pangan bergizi** (protein hewani, sayur, buah, kacang-kacangan).
- Memberikan insentif bagi pelaku bisnis yang menyediakan **pangan sehat dengan harga terjangkau** di kawasan miskin desa dan kota.

4. Mengarusutamakan Pendidikan Gizi dan Literasi Pangan

- Menjadikan **pendidikan gizi** bagian integral dari kurikulum sekolah, pendidikan keluarga, dan program keagamaan.
- Melibatkan media massa, influencer, dan tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan **gaya hidup makan sehat berbasis pangan lokal** yang bergizi dan berkelanjutan.

5. Memperkuat Data, Riset, dan Inovasi Kebijakan

- Mengembangkan sistem data terpadu yang memetakan **ketimpangan akses gizi desa–kota** secara real time.

- Mendorong riset interdisipliner (ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, teknologi pangan) yang fokus pada solusi **lokal dan kontekstual**.

6. Menjaga Akuntabilitas dan Partisipasi Publik

- Memastikan kebijakan pangan—termasuk program makan bergizi—dilaksanakan secara transparan, bebas dari korupsi, dan dapat diawasi publik.
- Mengundang partisipasi petani, komunitas, dan masyarakat sipil dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

IX. Penutup: Kedaulatan Pangan, Keadilan Sosial, dan Masa Depan Anak Indonesia

Kedaulatan pangan dan keadilan sosial pada hakikatnya adalah **dua sisi dari satu mata uang**:

- Tanpa kedaulatan pangan, sistem pangan mudah dikuasai oleh kekuatan pasar yang tidak peduli pada nasib petani kecil dan konsumen miskin.
- Tanpa keadilan sosial, bahkan produksi pangan berlimpah pun dapat ko-eksis dengan kelaparan, stunting, dan malnutrisi di kalangan kelompok rentan.

Kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi adalah **cermin ketimpangan struktural** dalam pembangunan. Di satu sisi, desa-desa menjadi produsen pangan tetapi tidak selalu menikmati gizi yang layak; di sisi lain, kota-kota menikmati keragaman pangan tetapi sering terjebak pola konsumsi yang tidak sehat dan eksklusif secara ekonomi.

Agenda ke depan bukan sekadar mengejar swasembada atau menurunkan angka impor, tetapi **membangun sistem pangan yang**:

1. **Berdaulat** – ditentukan oleh kepentingan bangsa dan rakyat, bukan semata oleh logika pasar global.
2. **Berkeadilan** – memastikan petani kecil dan rumah tangga miskin memperoleh haknya atas pangan bergizi.

3. **Berkelanjutan** – melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kapasitas generasi mendatang.

Jika kedaulatan pangan benar-benar diwujudkan sebagai proyek politik–moral yang berpihak pada yang lemah, dan keadilan sosial dijalankan bukan hanya sebagai slogan tetapi sebagai **kompas kebijakan**, maka kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi dapat dipersempit secara nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya angka statistik, tetapi **wajah anak-anak Indonesia—baik yang tumbuh di desa terpencil maupun di gang sempit kota besar—yang tumbuh sehat, cerdas, dan penuh harapan**. Di sanalah kedaulatan pangan menemukan maknanya yang paling dalam: bukan hanya kedaulatan di atas kertas, tetapi kedaulatan yang terasa di piring makan dan di masa depan generasi.

REFLEKSI DAN DISKUSI

untuk artikel: “Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial: Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi”

1. Pangan: Hak Dasar atau Sekadar Komoditas?

Salah satu pesan moral paling kuat dari pembahasan kedaulatan pangan adalah pertanyaan mendasar:

Apakah pangan diperlakukan sebagai hak dasar manusia, atau sekadar komoditas ekonomi yang mengikuti logika untung-rugi pasar?

Di banyak konteks, pangan bergerak seperti komoditas lain: dibeli, dijual, diekspor, ditimbun, dispekulasikan. Namun dari perspektif

keadilan sosial, pangan berada di level yang berbeda dengan mobil, gadget, atau barang konsumsi lainnya. Tanpa pangan bergizi, tidak ada kesehatan, tidak ada kapasitas belajar, tidak ada produktivitas, tidak ada masa depan.

Refleksi kritisnya:

- Ketika harga pangan naik dan kebijakan lambat merespons, **siapa yang paling menderita?**
- Ketika pangan berkualitas tinggi hanya tersedia di supermarket tertentu di kota besar, sementara desa produsen tetap kesulitan makan bergizi, **apakah sistem pangan kita sudah adil?**

Pertanyaan diskusi:

1. Dalam praktik sehari-hari, apakah pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sudah benar-benar memandang pangan sebagai *hak* atau masih dominan sebagai *komoditas*? Berikan contoh konkret.
2. Bagaimana konsekuensinya terhadap kebijakan (subsidi, impor, distribusi) jika pangan didefinisikan terlebih dahulu sebagai hak dasar, bukan sekadar barang dagangan?
3. Adakah ketegangan antara “pangan sebagai hak” dan “pangan sebagai komoditas”? Bagaimana cara menyeimbangkannya?

2. Ironi Desa Produsen Pangan yang Rawan Gizi

Salah satu ironi terbesar dalam isu ini adalah fakta bahwa **desa-desa penghasil pangan justru sering menjadi kantong kerawanan pangan dan stunting**. Petani menanam padi, sayur, buah, atau beternak, namun tidak selalu menjadi konsumen terbesar dari pangan berkualitas tinggi yang mereka hasilkan.

Petani menjual hasil terbaik ke pasar karena butuh uang tunai untuk biaya hidup, sekolah anak, cicilan, dan lain-lain. Di tingkat rumah tangga, pola makan bisa tetap didominasi nasi, garam, sambal, dan lauk sederhana yang tidak selalu bergizi cukup. Di sinilah terlihat jelas bahwa **produksi pangan tidak otomatis berarti akses gizi**.

Refleksi moralnya adalah pertanyaan keadilan:

Bagaimana mungkin mereka yang memberi makan bangsa justru menjadi kelompok yang paling rentan kekurangan gizi?

Pertanyaan diskusi:

4. Jelaskan mengapa desa yang kaya produksi pangan bisa tetap mengalami masalah gizi seperti stunting dan anemia. Faktor apa saja yang berperan (ekonomi, budaya, struktur pasar, dll.)?
5. Sejauh mana struktur rantai pasok (tengkulak, pedagang besar, retail modern) berkontribusi pada keterputusan antara “petani sebagai produsen” dan “petani sebagai konsumen gizi”?
6. Apa bentuk intervensi paling realistis untuk memastikan bahwa petani dan keluarganya menikmati pangan bergizi dari hasil produksi mereka sendiri (misalnya melalui kebun gizi, program koperasi pangan, kontrak pasokan ke program makan bergizi, dsb.)?

3. Ketimpangan Desa–Kota: Gizi, Gaya Hidup, dan Beban Ganda

Kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi bukan hanya soal “**desa kekurangan, kota berlimpah**”, tetapi lebih kompleks:

- Desa sering kekurangan pangan bergizi dan layanan dasar (air bersih, sanitasi, layanan kesehatan).
- Kota berlimpah pilihan pangan, tetapi justru menghadapi **banjir makanan ultra-proses**, tinggi gula, garam, dan lemak.

Hasilnya adalah **beban gizi ganda**:

- Di desa: stunting, kekurangan mikronutrien.
- Di kota: obesitas, diabetes, hipertensi—sering dalam rumah tangga yang sama, bahkan generasi yang sama.

Refleksi kritisnya:

- Kita sering memandang “kemajuan” hanya dari bertambahnya supermarket dan restoran waralaba di kota, tetapi lupa bertanya: **apakah itu juga berarti kemajuan dalam kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang?**
- Kita memuji pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan fakta bahwa beban biaya kesehatan akibat pola makan buruk bisa membengkak di masa depan.

Pertanyaan diskusi:

7. Bandingkan bentuk ketidakadilan gizi yang utama di desa dan di kota. Di mana letak “ketidakadilan struktural” dalam kedua konteks tersebut?
8. Bagaimana iklan, budaya populer, dan platform digital (media sosial) ikut membentuk preferensi makan generasi muda di desa dan kota? Adakah perbedaan pola?
9. Apakah mungkin merancang kebijakan pangan yang sekaligus mengatasi dua jenis masalah: kekurangan gizi di desa dan kelebihan gizi di kota? Contoh kebijakan seperti apa?

4. Kedaulatan Pangan sebagai Proyek Politik–Moral

Kedaulatan pangan, bila dipahami secara mendalam, bukan sekadar istilah teknokratis dalam dokumen kebijakan, melainkan suatu **proyek politik–moral**:

- Politik, karena ia menyangkut relasi kuasa: siapa mengendalikan lahan, benih, teknologi, pasar, dan regulasi.
- Moral, karena menyangkut komitmen untuk melindungi kelompok paling lemah (petani kecil, buruh tani, komunitas adat, keluarga miskin kota, balita, ibu hamil).

Pertanyaan penting di sini:

Apakah kedaulatan pangan dijalankan hanya sebagai slogan, atau sungguh-sungguh diterjemahkan dalam keberpihakan anggaran, regulasi, dan desain program?

Kedaulatan pangan mengajak kita bertanya:

- Apakah kebijakan lebih mengutamakan stabilitas harga di kota atau kesejahteraan petani di desa?
- Apakah cara kita mengelola impor, subsidi, dan insentif benar-benar memperkuat produsen kecil dan konsumen miskin, atau justru menguntungkan segelintir pemain besar?

Pertanyaan diskusi:

10. Dalam praktik, kebijakan pangan di Indonesia saat ini menurut Anda lebih mencerminkan paradigma “ketahanan pangan” atau

“kedaulatan pangan”? Berikan argumen dan contoh.

11. Apa indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan pangan berpihak pada keadilan sosial? Coba rumuskan 3–5 indikator sederhana.

12. Diskusikan potensi ketegangan antara kepentingan jangka pendek (misalnya harga pangan murah di kota) dan kepentingan jangka panjang (kelestarian lahan, keberlangsungan petani muda, kedaulatan pangan nasional). Bagaimana menyeimbangkannya?

5. Program Makan Bergizi dan Jaring Pengaman Sosial: Solusi atau Tambalan?

Berbagai program makan bergizi di sekolah, intervensi gizi ibu dan balita, bantuan pangan non tunai, dan skema lain adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan akses gizi. Namun, secara reflektif kita perlu bertanya:

- **Apakah program ini sekadar “menambal” akibat dari struktur yang tidak adil, atau juga memperbaiki struktur tersebut?**

Jika sumber pangan program-program ini masih berasal dari rantai pasok yang panjang, dikuasai segelintir pemasok besar, sementara petani kecil di desa tetap tidak mendapatkan manfaat ekonomi berarti, maka program tersebut berisiko menjadi **jaring pengaman yang baik, tetapi tidak mengubah akar ketidakadilan**.

Sebaliknya, jika program makan bergizi dikaitkan dengan:

- Koperasi petani lokal, BUMDes, dan UMKM pangan desa;
- Kontrak jangka panjang dengan harga yang adil;
- Pemberdayaan ekonomi komunitas produsen;

maka ia dapat menjadi **instrumen strategis** yang mendekatkan **kedaulatan pangan** dan **keadilan sosial** sekaligus.

Pertanyaan diskusi:

13. Bagaimana merancang program makan bergizi (di sekolah, puskesmas, atau komunitas) yang benar-benar menguntungkan petani desa sekaligus memperbaiki gizi anak desa dan kota?

14. Apakah ada risiko politisasi program makan gratis atau bantuan

pangan? Bagaimana menjaga agar program tetap fokus pada kepentingan anak dan keadilan sosial?

15. Apa peran data (misalnya pemetaan stunting, kemiskinan, produksi pangan lokal) dalam memastikan program-program ini tepat sasaran dan berkelanjutan?

6. Peran Teknologi Digital: Jembatan atau Tambahan Kesenjangan?

Teknologi digital—platform e-commerce, aplikasi pertanian, sistem informasi harga—sering dipandang sebagai solusi untuk menghubungkan desa dan kota. Petani bisa menjual langsung ke konsumen, perantara berkurang, harga lebih adil, konsumen kota mendapat akses pangan segar dari desa.

Namun refleksinya:

- Tidak semua desa memiliki akses internet, perangkat, dan literasi digital yang memadai.
- Platform digital tertentu bisa saja justru melahirkan “perantara baru” dengan kekuatan monopoli data dan algoritma.

Artinya, teknologi dapat menjadi **jembatan** sekaligus **sumber kesenjangan baru**, tergantung bagaimana ia diatur dan untuk siapa ia dirancang.

Pertanyaan diskusi:

16. Identifikasi peluang paling besar pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi kesenjangan desa–kota dalam akses pangan bergizi. Contoh konkret apa yang bisa dikembangkan?

17. Apa risiko bahwa platform digital justru memperbesar ketimpangan (misalnya hanya menguntungkan petani yang sudah relatif maju)? Bagaimana mitigasinya?

18. Siapa yang seharusnya memimpin pengembangan ekosistem digital pangan yang adil: negara, swasta, BUMN, koperasi, atau kombinasi? Jelaskan argumentasi Anda.

7. Tanggung Jawab Individu, Komunitas, dan Negara

Refleksi tentang kedaulatan pangan dan keadilan sosial tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan makro. Ia perlu turun ke level:

- **Individu:** pilihan konsumsi, gaya hidup, solidaritas.
- **Komunitas:** gerakan lokal, koperasi, kebun gizi, pendidikan gizi berbasis masyarakat.
- **Negara:** regulasi, anggaran, program, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri adalah:

- Sebagai **konsumen**, apakah kita mendukung pangan lokal bergizi, atau justru memperkuat dominasi produk ultra-proses murah namun miskin gizi?
- Sebagai **pendidik atau pemimpin komunitas**, apakah kita ikut menyuarakan dan mempraktikkan pola makan lebih sehat dan adil?
- Sebagai **warga negara**, apakah kita terlibat mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang tidak adil di sektor pangan?

Pertanyaan diskusi:

19. Sebutkan tiga tindakan kecil namun konkret yang dapat dilakukan individu (mahasiswa, guru, pemimpin jemaat, atau warga biasa) untuk berkontribusi pada keadilan pangan di lingkungan masing-masing.

20. Bagaimana komunitas lokal (RT/RW, desa, gereja/masjid, sekolah) dapat menjadi laboratorium kecil untuk praktik kedaulatan pangan dan akses gizi yang lebih adil?

21. Dalam pandangan Anda, apa ukuran paling sederhana bahwa “kedaulatan pangan dan keadilan sosial” mulai benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dokumen kebijakan?

8. Menggagas Masa Depan: Dari Wacana ke Gerakan

Akhirnya, refleksi terpenting adalah ini:

Apakah gagasan tentang kedaulatan pangan dan keadilan sosial akan berhenti sebagai wacana, atau akan bergerak menjadi **gerakan**?

Gerakan yang dimaksud bukan semata demonstrasi, tetapi rangkaian tindakan kolektif yang konsisten dan berkelanjutan:

*Rudy C Tarumingkeng: Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial:
Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi*

- Petani yang semakin berdaya dan terorganisasi.
- Anak-anak desa dan kota yang tumbuh dengan pola makan sehat, mengenal pangan lokal, dan kritis terhadap iklan makanan.
- Pemerintah yang berani membuat kebijakan tidak populer tetapi adil bagi jangka panjang.
- Masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas iman yang terus mengingatkan bahwa **gizi anak adalah cermin moral sebuah bangsa**.

Di titik ini, diskusi tentang kedaulatan pangan dan keadilan sosial bukan lagi sekadar soal “teori kebijakan”, tetapi juga tentang **siapa kita sebagai masyarakat**:

- Apakah kita rela menerima bahwa sebagian anak bangsa tumbuh dengan gizi kurang sementara sebagian lain menikmati kelimpahan tanpa batas?
- Atau kita memilih jalan yang lebih sulit: menata ulang sistem yang timpang, demi memastikan bahwa **anak desa dan anak kota, kaya dan miskin, sama-sama memiliki hak yang nyata atas pangan bergizi**?

Itulah pertanyaan reflektif terakhir yang dapat menjadi bahan renungan pribadi, diskusi kelas, FGD komunitas, maupun lokakarya kebijakan:

Seandainya sistem pangan Indonesia benar-benar berdaulat dan berkeadilan, apa yang akan berbeda dalam kehidupan sehari-hari di desa dan kota 10–20 tahun ke depan?

Diskusikan, bayangkan, lalu mulailah dari langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan hari ini.

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Referensi** untuk melengkapi artikel:
“Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial: Mengurangi Kesenjangan Desa–Kota dalam Akses Pangan Bergizi”

A. Glosarium

1. Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty)

Hak bangsa dan rakyat untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan, sistem pertanian, peternakan, dan perikanannya sendiri, yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh warga dan tidak berada di bawah subordinasi kekuatan pasar internasional. ([Serikat Petani Indonesia](#))

2. Ketahanan Pangan (Food Security)

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Umumnya lebih menekankan pada aspek ketersediaan dan akses, bukan pada siapa yang mengendalikan sistem pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

3. Kemandirian Pangan (Food Self-Reliance)

Kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk memproduksi sebagian besar kebutuhan pangan dari sumber daya domestik sendiri, dengan tetap memanfaatkan perdagangan internasional secara selektif dan bijak. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

4. Keadilan Sosial (Social Justice)

Prinsip yang menekankan distribusi hak, kesempatan, dan sumber daya (termasuk pangan bergizi) secara adil di antara seluruh anggota masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok yang lemah dan rentan.

5. Akses Pangan Bergizi

Kemampuan rumah tangga dan individu untuk memperoleh pangan yang tidak hanya cukup kalori, tetapi juga kaya protein, vitamin, mineral, dan serat, dengan kualitas aman dan harga terjangkau, secara berkelanjutan.

6. Kesenjangan Desa–Kota

Perbedaan signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dalam hal pendapatan, akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi), infrastruktur, dan dalam konteks artikel ini: akses terhadap pangan bergizi.

7. Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan menurut umur yang berada di bawah standar WHO. Stunting sering lebih tinggi di wilayah pedesaan dan kelompok miskin. ([PubMed](#))

8. Double Burden of Malnutrition (Beban Gizi Ganda)

Situasi ketika dalam satu populasi (bahkan satu rumah tangga) terjadi secara bersamaan masalah kekurangan gizi (stunting, anemia, berat badan rendah) dan kelebihan gizi (overweight/obesitas, penyakit tidak menular). ([ScienceDirect](#))

9. Malnutrisi

Kondisi gizi tidak seimbang yang mencakup kekurangan gizi (undernutrition) dan kelebihan gizi (overnutrition), serta defisiensi mikronutrien (vitamin dan mineral penting).

10. Infrastruktur Pangan

Jaringan fisik dan kelembagaan yang memungkinkan produksi, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pangan, termasuk jalan, jembatan, pasar, gudang, rantai dingin (cold chain), serta sistem informasi dan logistik. ([Scholar Hub](#))

11. Rantai Nilai Pangan (Food Value Chain)

Rangkaian aktivitas dari hulu ke hilir—produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi pangan—yang melibatkan berbagai pelaku: petani, pedagang pengumpul, industri pengolahan, pengecer, dan konsumen.

12. Pangan Ultra-Proses (Ultra-Processed Food)

Produk pangan hasil industri dengan tingkat pemrosesan tinggi, biasanya mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi, serta berbagai aditif (pengawet, pewarna, perisa), dan cenderung miskin

serat serta mikronutrien. Konsumsinya meningkat di kawasan urban. ([ScienceDirect](#))

13. **Pangan Lokal**

Pangan yang berasal dari sumber daya lokal dan telah lama menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat setempat, seperti sagu, singkong, jagung lokal, umbi-umbian, ikan laut dan sungai, sayur dan buah tropis.

14. **Kebijakan Pangan**

Serangkaian regulasi, program, dan keputusan pemerintah yang mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan kualitas pangan, termasuk aspek impor, subsidi, harga, dan standar keamanan pangan. ([ppsub.ub.ac.id](#))

15. **Program Makan Bergizi Gratis (MBG) / School Feeding**

Program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi anak sekolah, ibu hamil, atau kelompok rentan, yang bertujuan mengurangi stunting, meningkatkan kualitas gizi, dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan petani dan pelaku pangan domestik. ([AP News](#))

16. **Urban Farming**

Kegiatan budidaya tanaman pangan dan ternak dalam skala kecil di wilayah perkotaan (pekarangan, rooftop, lahan sempit, lahan tidur) untuk meningkatkan ketersediaan pangan segar dan menekan biaya konsumsi pangan sehat.

17. **Kebun Gizi / Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**

Model pemanfaatan pekarangan rumah, lahan sekolah, atau lahan desa untuk menanam sayuran, buah, dan tanaman obat keluarga guna mendukung ketahanan gizi rumah tangga dan komunitas, terutama di pedesaan.

18. **Jaring Pengaman Sosial Berbasis Pangan**

Program bantuan sosial yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi (bukan sekadar kalori), seperti bantuan pangan non-tunai, kupon pangan bergizi, atau penyaluran paket pangan sehat untuk kelompok rentan.

19. **Literasi Gizi**

Tingkat pemahaman individu/kelompok tentang komposisi gizi, pola makan seimbang, risiko makanan ultra-proses, dan cara memilih serta mengolah pangan yang sehat dan aman.

20. **Food Justice (Keadilan Pangan)**

Pendekatan normatif yang menekankan bahwa sistem pangan harus adil bagi semua pihak: produsen kecil, buruh tani, konsumen miskin, dan generasi mendatang; serta peka terhadap dimensi ras, kelas, gender, dan lokasi (desa–kota).

B. Daftar Referensi

1. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.([BPHN](#))
2. Hukumonline. (2022). *Definisi Kedaulatan Pangan*. Diakses dari Hukumonline Kamus Hukum.([Hukumonline](#))
3. Badan Pangan Nasional. (tanpa tahun). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.([Badan Pangan Nasional](#))

2. Literatur tentang Kedaulatan Pangan dan Gerakan Petani

4. La Via Campesina. (1996). *The Right to Produce and Access to Land* (Declaration of Food Sovereignty).([safsc.org.za](#))
5. La Via Campesina. (2003). *Food Sovereignty* (Dokumen penjelasan awal konsep).([viacampesina.org](#))
6. La Via Campesina. (2021). *Food Sovereignty: A Manifesto for the Future of Our Planet*.([viacampesina.org](#))
7. Serikat Petani Indonesia (SPI). (tanpa tahun). *Kedaulatan Pangan* (Isu Utama SPI).([Serikat Petani Indonesia](#))

3. Studi tentang Stunting dan Kesenjangan Desa–Kota di Indonesia

8. Widyaningsih, V., dkk. (2022). *Determinants of socioeconomic and rural–urban disparities in stunting among under-five children in Indonesia*. Rural and Remote Health. ([PubMed](#))
9. Siramaneerat, I., dkk. (2024). *Examining determinants of stunting in urban and rural Indonesian children*. ([Universitas Airlangga Scholar](#))
10. Nisrina, M. Y., dkk. (2025). *Urban-rural disparities and determinants of stunting among children under five in Indonesia*. ([E-Jurnal](#))
11. Mauludyani, A. V. R., dkk. (2025). *Factors Associated with Stunting Prevalence in Indonesia*. ([revista.nutricion.org](#))
12. World Bank. (2015). *The Double Burden of Malnutrition in Indonesia*. ([World Bank](#))

4. Studi tentang Double Burden of Malnutrition dan Pola Konsumsi

13. Lowe, C., dkk. (2021). *The double burden of malnutrition and dietary patterns in Indonesian children and women*. EClinicalMedicine. ([ScienceDirect](#))
14. Maehara, M., dkk. (2019). *Patterns and risk factors of double burden of malnutrition among adolescents in Indonesia*. PLOS ONE. ([PLOS](#))
15. Sekiyama, M., dkk. (2015). *Double Burden of Malnutrition in Rural West Java, Indonesia*. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. ([PMC](#))
16. Muharram, F. R., dkk. (2025). *Trends in the double burden of malnutrition among Indonesian population groups*. Scientific Reports. ([Nature](#))

5. Ketimpangan Akses Pangan, Infrastruktur, dan Lingkungan

17. Various authors. *Ketahanan Pangan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Tantangan*. Perpustakaan DPR RI (naskah kebijakan). ([DPR Library](#))
18. Artikel dan laporan terkait infrastruktur pangan, logistik, dan distribusi di Indonesia (jalan, jembatan, pelabuhan, cold chain) dari berbagai kementerian dan lembaga (Kementerian PUPR,

Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional).([Scholar Hub](#))

6. Program Nasional Makan Bergizi dan Intervensi Gizi

19. AP News. (2024/2025). *Indonesia launches free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition*.([AP News](#))
20. Financial Times. (2025). *Indonesia places a \$28bn bet on free school meals*.([Financial Times](#))
21. Artikel dan laporan WHO/UNICEF tentang *double-duty actions* untuk mengatasi double burden of malnutrition secara simultan. ([E-Journal Universitas Airlangga](#))

7. Literatur Tambahan (Teoretis dan Konseptual)

22. Tulisan-tulisan akademik dan kebijakan tentang **food justice**, **rural–urban inequality**, dan **right to food** dari jurnal-jurnal internasional (Food Policy, World Development, Global Food Security, dsb.).
23. Laporan-laporan FAO, IFAD, dan WFP terkait kondisi ketahanan dan kedaulatan pangan, strategi mengatasi stunting, dan pengembangan sistem pangan berkelanjutan di negara berkembang.

Copilot for this article - Chatgpt 5.1 Thinking, Access date: 8 December 2025. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/69355e2a-d070-8323-b3e0-641aaf47a8f9>